

## Gubernur Anies Tarik Rem Darurat, PKS DKI Minta BLT Segera Disalurkan

JAKARTA (IM) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menarik rem darurat untuk menekan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat bakal berlaku mulai hari ini, Senin (11/1).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Aziz berharap dengan adanya BLT dapat meringankan beban masyarakat.

“Hal yang harus dipertimbangkan adalah agar segera disalurkan BLT untuk masyarakat, jadi ini jangan sampai masyarakat, sekarang kan lagi susah-susah, jangan sampai dampak Covid ini secara ekonomi berdampak kepada

masyarakat kecil, sehingga kami khawatir kriminalitas akan meningkat gitu,” ujar Aziz saat dihubungi, Sabtu (9/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyebut, keputusan Anies untuk menarik rem darurat karena saat ini penyebaran virus korona sudah semakin parah. Menurutnya, tingkat keterisian rumah sakit khusus COVID-19 di DKI juga sudah tinggi. “Karena memang keadaan sekarang kan sudah cukup parah, ini kalau kita lihat laporan-laporan dari rumah sakit juga banyak sudah penuh, kapasitas dan juga kita mendengar juga pendapat para ahli juga mendorong seperti itu,” ucapnya.

Aziz menyebut Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat bukan hanya keputusan Anies. Menurutnya, ada pertimbangan dari para ahli di dalamnya yang menjadi dasar keputusan. ● osm

## Dirum dan Dewas Dijabat Plt Buat Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Jalan di Tempat

CIKARANG PUSAT (IM) - Kinerja direksi PDAM Tirta Bhagasasi, terkesan jalan di tempat. Akibatnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bekasi yang bergerak dalam “jual - beli” air itu jadi pertanyaan berbagai pihak.

“Bagaimana mau kinerjanya meningkat jika komposisi direksi dan pengawas, masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Harusnya, Pemkab Bekasi dan Walikota Bekasi serta Direktur Utamanya, Usep Rahman Salim cepat tanggap dengan adanya hal itu” kata dewan pendiri LSM Jeko, Bob, Minggu (10/1).

Menurutnya, pemilik modal dalam hal ini Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi kurang serius menerapkan berbagai kebijakan dalam usaha tersebut. Sementara Bupati Bekasi kembali menugaskan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi untuk masa jabatan periode 2020 - 2024.

“Sudah lebih dari 3 bulan, Usep Rahman Salim ditunjuk Bupati untuk menjalankan bisnis itu hingga sekarang belum menunjukkan kinerjanya,” kata Bob.

Bob menjelaskan, sebelum dia ditunjuk kembali menjadi Dirut, Usep tahu kalau posisi Direktur Umum (Dirum) masih kosong. Namun, setelah dia ditunjuk kembali jadi Dirut hingga sekarang, Usep belum juga membentuk panitia seleksi untuk jabatan itu.

“Bagaimana mau maksimal dan meningkatkan kinerjanya, jika ditubuh PDAM itu dijabat oleh Plt. Di jajaran direksi ada Plt, begitu juga di dewan pengawas,” tutur Dewan Pendiri LSM Jeko itu.

Masih menurut Bob, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi serta Dirut PDAM senang “bermain” dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

“Lihat saja di lingkungan Pemkab Bekasi banyak posisi jabatan eselon II dan III yang kosong dan Bupati kemudian menunjuk Plt. Jangan jangan Dirut PDAM itu ikut ikut sehingga mengganjal terbentuknya panitia seleksi (pansel) untuk Jabatan Dirum,” celetuk Bob.

Anehnya lagi, sambungnya, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, terkesan ikut ikutan terbawa arus “permainan” itu dan ini tergambar dari tidak adanya desakan yang dilakukan kepada Pemkab Bekasi (PDAM Tirta Bhagasasi) terkait kekosongan dan pengisian jabatan Direktur Umum PDAM itu.

“Waktu kantor pusat PDAM Tirta Bhagasasi berada di wilayah Kota Bekasi, setiap ada kekosongan jabatan Dirum, Walikota Bekasi cepat tanggap. Namun kenapa sekarang diam dan bahkan lebih tanggap terhadap kenaikan harga tarif air PDAM,” celetuknya lagi.

Padahal untuk mengisi pengisian jabatan yang “kosong” itu sudah jelas ada aturannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD.

Dalam Pasal 4 disebutkan, apabila ada kekosongan jabatan, maka Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bekasi / Walikota Bekasi segera melapor untuk mengisi jabatan itu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah paling lama 15 hari kerja sejak kekosongan jabatan itu terjadi. ● ris

## Riski Lemes, 5 Anggota keluarganya Ada di Dalam Sriwijaya Air SJ-182

TANGERANG (IM) - Keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak mendarat di krisis center Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu (10/1). Salah satunya adalah Riski Kurniawan. Riski merupakan seorang awak kabin sebuah perusahaan penerbangan, tetapi bukan di Sriwijaya Air. Dia mengatakan, ada lima kerabatnya yang menjadi penumpang pesawat nahas tersebut.

“Di manifes namanya Rizky Wahyudi dipanggil Kiki, Rosiana Wahyuni, mamahnya, sama dua anak. Satu umur 12 tahun, satu bayi masih 6-7 bulan,” ujar Riski di Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/1).

Menurut Riski, sepupunya yang bernama Kiki tengah berdinan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kiki sedang memboyong anggota keluarganya yang berjumlah empat orang itu ke Pontianak.

“Kami itu sebenarnya keluarga jauh. Cuma di grup (Whatsapp) sudah dikasih tahu bahwa, dia memang pingin bawa keluarganya ke Pontianak,” ungkapnya.

Kelompok berangkat bersama-sama dari Bangka

menuju Jakarta dan sempat menemui keluarga. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu lalu. “Jadi mereka kumpul di Bangka. Terus membawa keluarga dari Bangka ke Jakarta untuk transit ke Pontianak,” ungkapnya.

Riski mengaku kaget ketika mendengar kabar bahwa pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak tersebut hilang kontak dan jatuh di kawasan Kepulauan Seribu. Dia lalu berupaya mencari kebenaran informasi kecelakan tersebut kepada para koleganya melalui grup Whatsapp. Riski juga meminta tolong untuk dicarikan data manifes untuk memastikan apakah lima anggota keluarganya jadi penumpang pesawat tersebut.

“Saya minta data manifes ke teman-teman grup saya. Karena saya juga air crew, jadi saya tanya. Saya ingin tahu ada nggak nama keluarga saya di situ, dan pas dibilang ada saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi,” ujarnya.

Saat mengetahui bahwa kelima anggota keluarganya menjadi penumpang di pesawat tersebut, Riski langsung menyampaikannya kepada pihak keluarga besar. Saat ini, dia masih mencari informasi lebih lanjut mengenai kondisi dan keberadaan lima anggota keluarganya tersebut. ● ber

# 4 Metropolis

IDN/ANTARA



## PENCARIAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 182

Kapal Basarnas KN SAR Wisnu melakukan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta - Pontianak yang hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (10/1). Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pada Sabtu (9/1) sekitar pukul 14.40 WIB di ketinggian 10 ribu kaki tersebut membawa enam awak dan 56 penumpang.

# Begini Aturan Lengkap Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan di Jakarta

PPKM diberlakukan maka penanganan Covid-19 di Jabodetabek Lebih Terintegrasi. Melalui Keputusan Gubernur, Anies menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat mulai 11 - 25 Januari 2021.

JAKARTA (IM) - Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan, pembatasan kegiatan

akan diterapkan secara terbatas dengan tujuan untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan. Namun, di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan aturan mengenai pembatasan

sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 3-17 Januari 2021.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menerbitkan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur terkait pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta. Keputusan Gubernur Anies yakni Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Melalui Keputusan itu, Anies menetapkan pemberlakuan PSBB mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Anies juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2020 tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Namun, dalam Pergub dan Keputusan yang diterbitkan, Anies tak menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang baru diumumkan pemerintah pusat dan tetap menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pengetatan ini diambil berdasarkan PPKM Jawa-Bali yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah pusat.

## Berikut Ini Aturannya

Tempat kerja menerapkan 75 persen bekerja dari rumah atau work from home. Belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Pusat perbelanjaan maksimal beroperasi sampai dengan pukul 19.00 WIB. Restoran maksimal melayani makan atau minum di tempat hingga pukul 19.00 WIB, sedangkan lay-

anan dibawa pulang atau take away 24 jam. Tempat ibadah beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Transportasi umum beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan protokol kesehatan maksimal pukul 20.00 WIB.

Dengan terbitnya aturan ini, Anies yakin penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan lebih terintegrasi. Menurutnya, selama ini kasus Covid-19 di Jakarta dan wilayah penyangganya di Jabodetabek saling terkait. Ini terlihat berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium di Jakarta.

Pada Desember 2020, ditemukan 63.742 kasus positif oleh lab di Jakarta dan 26 persen di antaranya adalah warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Demikian pula perawatan di fasilitas kesehatan di Jakarta. Sekitar 24-27 persen dari pasien yang dirawat di faskes Jakarta adalah warga luar DKI Jakarta, terutama Bodetabek. “Artinya, ada keterkaitan erat antara Jakarta dan wilayah sekitarnya” ujar Anies. ● osm

## Wali Kota Bekasi Berharap Warga Dukong Program Vaksinasi Nasional

KOTA BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap dukungan setiap elemen masyarakat guna menyukseskan Vaksinasi Covid-19 di wilayahnya. Menjelang Vaksinasi Nasional Covid-19 tahun 2021 yang akan dilaksanakan, ditandai dengan Presiden RI Joko Widodo menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021 mendatang.

Dalam Siaran Pers Humas Pemkot Bekasi, Jum'at (8/1) disebutkan, sesuai dengan SK Dirjen P2P pada tahap awal Januari - April 2021, vaksinasi akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Dan sebagai informasi awal, jumlah tenaga kesehatan Kota Bekasi yang akan divaksin adalah sebanyak 11.983 orang dan tahap 2 vaksinasi dilakukan pada petugas layanan publik pada periode Januari - April 2021, berjalan paralel dengan tahap 1. Untuk jumlah vaksinasi pada tahap 2,

belum ada informasi.

Penentuan sasaran ditetapkan melalui koordinasi kementerian dan lembaga melalui sistem satu data. Untuk jumlah sasaran ini masih bersifat dinamis dan Kota Bekasi mengikuti perkembangan informasi dari pusat.

Vaksinasi ini diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi warga Indonesia. Vaksin Melindungi Diri dan Melindungi Negeri.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Kesehatan, proses vaksinasi akan diprioritaskan kepada kelompok usia rentan dari Usia 18-59 tahun dari tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, petugas pelayanan publik, lansia, dan masyarakat umum. Kemudian kepada contact tracing, kontak erat Covid-19 merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 dan ad-

ministrasi yang terlibat dalam pelayanan publik.

Vaksinasi dilaksanakan di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan di 42 Puskesmas, 46 RS dan 32 Klinik se-Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi akan menerima vaksin dari Pemerintah Pusat yang akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui unit-unit kesehatan di Kota Bekasi. Vaksin sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit. Dan vaksinasi ini diberikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya apapun. Bagi warga Kota Bekasi, vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga diri dan keluarga, selain tetap selalu mematuhi protokol kesehatan 4M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan. ● mdl

## 15 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Depan Rusun Karet Tengsin

TANAH ABANG (IM) - Aparat gabungan unsur Tiga Pilar Kelurahan Karet Tengsin kembali melaksanakan Operasi Yustisi Tertib Masker, di depan Rusun Karet Tengsin, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).

Kegiatan ini dilakukan oleh Babinsa Koramil 05/TA jajaran Kodim 0501/JP BS, anggota Polsek Metro Tanah Abang, Satpol PP, anggota Kelurahan dan FKDM.

Pada Operasi Yustisi tersebut aparat gabungan masih mendapati 15 orang warga

yang tidak memakai masker dan diganjar sanksi sosial, dengan menyapu bersih lingkungan.

“Kami sangat menyayangkan disaat pandemi Covid-19 ini masih ada warga yang telor dengan tidak memakai masker saat di luar rumah, bahkan tidak main-main sampai 15 orang warga yang terjaring saat pelaksanaan operasi yang dilakukan hingga pukul 09.00 pagi ini,” ujar Dandim 0501/JP BS Kolonel Inf Luqman Arief menyalskan.

Dandim berharap warga

semakin sadar untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

“Kami berharap warga selalu mengikuti pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah di masa pandemi, dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” tegas Dandim.

“Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” tandasnya. ● tom



Aparat gabungan unsur Tiga Pilar Kelurahan Karet Tengsin kembali melaksanakan Operasi Yustisi Tertib Masker.

## RS Polri Buka Hotline untuk Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

JAKARTA (IM) - Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati di Jakarta Timur membuka hotline center yang beroperasi 24 jam untuk memberikan informasi bagi keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1).

“Saya informasikan bahwa Rumah Sakit Polri telah membuka hotline dengan nomor 081235039292,” kata Kepala RS Polri Brigjen Pol Asep Hendriana saat konferensi pers, Minggu (10/1).

Asep melanjutkan, RS Polri juga telah menyiapkan pendampingan bagi keluarga, termasuk menyediakan psikolog

“Ada tenda atau posko pendampingan keluarga. Jadi keluarga yang menyampaikan ante mortem nanti bisa beristirahat. Kami siapkan psikolog yang akan membantu trauma healing dan menenangkan keluarga dan sebagainya, di posko pendampingan keluarga,”

## Kontraktor Pemkab Bekasi Tuding Pelaksanaan Kegiatan E-Catalog Carut Marut

CIKARANG PUSAT (IM) - Kontraktor menuding pelaksanaan kegiatan e-catalog beton di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2020 carut marut.

Pasalnya, hingga kini semua Berita Acara (BA) atas kegiatan e-catalog tersebut belum selesai alias molor.

Salah satu kontraktor yang minta namanya tidak disebut, kepada International Media belum lama ini mengatakan, jika seluruh berita acara (BA) atas kegiatan e-catalog itu hingga kini belum selesai.

Beni Saputra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi ketika dihubungi via telepon beberapa waktu lalu menjelaskan, penerapan sistem e-catalog beton tersebut sudah

diinisiasi pejabat sebelumnya.

“Klu ga salah zaman pak Iwan Ridwan,” katanya. Kaitan kontrak puyung hukum dengan vendor, sambungnya, ditandatangani oleh pak Sekda Uju.

“Uang APBD pada pekerjaan e-catalog beton lebih efisien dibanding sebelumnya,” katanya memberi alasan. Berdasarkan informasi, Tahun Anggaran 2020, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan e-catalog beton sebanyak 800 kegiatan dengan total anggaran sekitar 150 miliar.

Eti Supriadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler terkait keluhan kontraktor itu, tidak ada jawaban. ● ris